



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : II
Rapat Ke- : 8
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Senin, 22 November 2021
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara : Membicarakan pembentukan DOP Provinsi Seireri
Ketua Rapat : **Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH/Wakil Ketua
Komisi II DPR RI**
Sekretaris Rapat : Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir : A. Anggota Komisi II DPR RI
B. Ketua Forum Kepala Daerah se-Wilayah Seireri

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Kepala Daerah se-Wilayah Seireri, dengan agenda membicarakan pembentukan DOP Provinsi Seireri, hari Senin, 22 November 2021, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Junimart Girsang, SH, MBA, MH, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Kepala Daerah se-Wilayah Seireri, dengan agenda membicarakan pembentukan DOP Provinsi Seireri, sebagai berikut:

1. Ketua Forum Kepala Daerah se-Wilayah Seireri

Dengan adanya PP 106/2021, maka kami melihat memberikan ruang dalam pemekaran bisa dilakukan secara *bottom up* untuk mengakomodasi DOB. Kami berkeinginan wilayah adat Seireri menjadi DOB. Untuk itu ketika revisi UU Otsus Papua masih dalam

DOB. Untuk itu ketika revisi UU Otsus Papua masih dalam pembahasan otsus papua, seluruh wilayah adat menjadi polemik. Seireri dari awal mendukung otsus jilid 2, kami yang mendukung sejak awal, ketika wilayah adat lain sebagian menolak revisi UU Otsus Papua. Dan kami sudah menyampaikan hal itu ke Pansus Otsus Papua DPR RI dan Kemendagri. Sehingga ketika itu, Kemendagri meminta kami untuk menyampaikan pendapat kami Kementerian Koordinator polhukam serta kementerian terkait lainnya.

Untuk itu kami sekali lagi meminta DOB, untuk wilayah adat seireri. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya kami mengalami perabdan lebih awal dari wilayah lain. Untuk itu wajar bila kami menyatakan siap untuk menjadi DOB.

2. Bupati Kepulauan Yapen

Kondisi di papua sering dipahami sebagai wilayah konflik, tapi wilayah kami secara umum merupakan wilayah yang kondusif. Untuk itu agar tidak terpengaruh, maka kita ingin pisah karena wilayah kami sebenarnya sangat kondusif. Mengapa? Karena kita ingin ada investasi ke daerah kami. Wilayah kami yang merupakan kepulauan di samudra pacific tentu sangat terbuka untuk investor. Hal ini penting kami lakukan agar daerah kami maju, karena kami menyadari kami tidak memiliki tambang atau sumber daya alam yang cukup. Sehingga, kalau kami tidak pisah, dengan kondisi yang dianggap rawan konflik, maka berat untuk menarik investor baru. Sehingga wilayah kami, akan terhambat untuk maju. Dengan demikian kalau ada pemekaran, maka diharapkan mendorong adanya investor.

Kepemimpinan di Papua sekarang kurang bagus, demokrasi 20-30 tahun kedepan tidak ada kepemimpinan yang bisa diharapkan karena ada perbedaan cara pemilu, karena di pegunungan masih pake noken, sementara di pesisir seperti kami berlaku *one man one vote*. Perbedaan dalam pemungutan suara akan berpengaruh dalam kehidupan pemerintahan. Oleh karena itu, pemekaran DOB adalah jawaban agar kehidupan semakin baik di wilayah kami. Apalagi dengan adanya PP yang membolehkan adanya DOB tidak harus 5 kab/kota sebagaimana dalam UU pemda, bisa dengan 4 kabupaten sudah bisa mengusulkan pembentukan DOB.

3. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen

Deklarasi pemuda di Seireri tanggal 28 Okt 2021 meminta DOB Seireri kami dukung. Untuk itu keinginan Seireri untuk menjadi DOB alangkah baiknya disetujui. Karena dengan DOB tersebut maka diharapkan akan ada percepatan pembangunan di Seireri. Keadaan alam kami cukup menjanjikan, mempercepat pembangunan. Untuk kami harapkan, kita dilibatkan pembentukan DOB Seireri.

4. Anggota DPR Provinsi Papua dari Dapil Wilayah Adat Seireri

Wilayah Seireri merupakan daerah yang telah melahirkan tokoh-tokoh Papua, tokoh pejuang NKRI, olahragawan, seniman banyak dari seireri. Terus terang kita banyak dikorbankan oleh sistem noken, oleh

karena itu kami sangat berterimakasih kasih kepada DPR RI karena dalam UU Otsus Papua hasil revisi, ada anggota DPRP dan DPRK Kab/Kota dengan system pengangkatan, system tersebut adalah upaya konkrit menghormati wilayah adat.

Terkait masalah stabilitas keamanan, kita harapkan tidak selalu dikaitkan dengan konflik di Papua, karena tidak semua Papua adalah wilayah konflik. Hal ini penting karena masalah stabilitas terkait langsung dengan daya tarik investasi.

Kita ingin agar Seireri menjadi pusat pertumbuhan investasi. Seperti misalnya potensi perikanan kami sangat besar, sesuai dengan data dari Kementerian KKP potensi perikanan di wilayah Seireri sebesar 17 triliun. Sebuah potensi besar yang harus segera diwujudkan, dan hal itu lebih mudah dilakukan manakal ada DOB Seireri.

III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Forum Kepala Daerah se-Wilayah Seireri, dengan agenda membicarakan pembentukan DOP Provinsi Seireri, sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengarkan masukan-masukan yang telah disampaikan dan akan melakukan pembahasan lebih lanjut pada Rapat Intern Komisi II DPR RI.
2. Komisi II DPR RI menyarankan agar forum menyerahkan naskah akademik pembentukan DOB Seireri.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.27 WIB

Jakarta, 22 November 2021
KETUA RAPAT

Dr. JUNIMART GIRSANG, SH, MBA, MH.

A-142